

KR RADIO
107.2 FM

Selasa, 23 Maret 2021

05.00	Bening Hati	14.00	Radio Action
05.30	Pagi-pagi Campursari	16.00	Pariwara Sore
06.45	Lintas Liputan Pagi	16.10	KR Relax
07.00	Pariwara Pagi	19.00	Lintas Liputan Malam
09.00	Teras Dangdut	19.15	Digoda
11.00	Family Radio	21.00	Berita NHK
		22.00	Lesehan Campur Sari

Grafis: Arlo

PALANG MERAH INDONESIA

Stok Darah

UNIT DONOR DARAH	A	B	O	AB
PMI Yogyakarta (0274) 372176	31	29	30	39
PMI Sleman (0274) 869909	17	10	26	37
PMI Bantul (0274) 2810022	2	3	2	0
PMI Kulonprogo (0274) 773244	31	2	22	8
PMI Gunungkidul (0274) 394500	5	14	8	1

Sumber: PMI DIY. (Stok darah bisa berubah sewaktu-waktu). (APW/ Arlo)

LAYANAN SIM KELILING

Selasa, 23 Maret 2021

POLRES/TA	POLSEK	LOKASI	JAM
Ditlantas	Prambanan	Kantor SAT PJR Prambanan	09:00 - 12:00
Senin - Sabtu	Seluruh Satpas Polda DIY	SIM Corner Ramai Mall SIM Corner Jogja City Mall	10:00 - 15:00 10:00 - 15:00

Sumber: Polda DIY (Sni/Jos)



Hasto Wardoyo (tengah) memberi sambutan.

OPTIMALKAN PENGADAAN PETANI LOKAL DIY Belum Perlu Datangkan Beras Impor

YOGYA (KR) - DIY belum berpikir untuk mendatangkan beras impor dari luar negeri sebab produksinya sangat mencukupi, bahkan tergolong surplus dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan beras di DIY dilaporkan mencapai 46.419 ton per 15 Maret 2021 dengan mengoptimalkan pengadaan setara beras dari petani lokal.

"Produksi padi di DIY sangat mencukupi, sehingga belum perlu mengajukan beras impor dari luar negeri. Termasuk pada situasi force majeure, kami sudah bekerja sama dengan Tarumartani untuk mengamankan stok komoditi pangan pokok khususnya beras," ujar Kepala Dinas Pertanian

dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY Sugeng Purwanto kepada KR di Gedhong Pracimosono Kepatihan, Senin (22/3).

Sugeng menyampaikan dengan kondisi ketersediaan produksi bahan pangan pokok terutama beras yang mencukupi, maka DIY belum berpikir untuk impor beras. Na-

mun apabila ada kebijakan nasional untuk melakukan impor beras untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, itu merupakan keputusan pusat.

"Jika itu kebijakan untuk DIY, kita belum perlu mendatangkan beras impor tersebut. Impor di sini bisa mendatangkan pa-

sukan dari daerah lain atau perdagangan antar daerah dan mendatangkan pasokan dari luar negeri," tandasnya.

DPKP DIY melaporkan berdasarkan data pangan yang dihimpun dari kabupaten/kota se-DIY, ketersediaan beras mencapai 46.419 ton dengan harga Rp 9.500/Kg. Sedangkan prediksi/kesanggupan luas tanam (LT) padi mencapai 10.239 selama Maret 2021 ini.

Kepala Kanwil Perum Bulog DIY Juaheni menegaskan pihaknya tengah mengoptimalkan peng-

adaan setara beras dari petani lokal supaya target pengadaan 2021 ini sebesar 74 ribu ton bisa terpenuhi. Jika pengadaan setara beras atau beras bagus dari petani lokal maka tidak perlu mendatangkan beras impor ke DIY. Beras impor ini biasanya yang mengajukan Jawa Timur, DKI Jakarta dan Medan.

"Kami terus usahakan penyerapan produk petani lokal tahun ini. Mudah-mudahan bisa terpenuhi supaya tidak perlu mendatangkan beras impor," imbuhnya. **(Ira)-d**

RAKERDA IPHI Produktif Supaya Lebih Manfaat

WATES (KR) - Program kerja Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kulonprogo periode 2020-2025 agar direncanakan lebih diprioritaskan memberi manfaat kepada orang lain. Sedangkan pembangunan fisik harus diikuti pembangunan mental spiritual.

"Karakter kita bukan karakter produktif, tapi kita harus mampu mendorong sesama agar produktif supaya lebih manfaat. Semangat IPHI membangun gedung, jangan *show of force* tanpa peduli kepada yang membutuhkan. Jadi yang penting punya gedung bagus tapi harus perhatian terhadap orang lain," tandas Ketua IPHI Kulonprogo Dr (HC) dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) pada rapat kerja daerah (Rakerda) IPHI, di kompleks Sadewa, Minggu (21/3). Rakerda tersebut dipandu Sekretaris IPHI, H Abdul Rohman SAg MA.

Hasto menyatakan, kemiskinan di Kulonprogo masih 18 persen. Maka yang terpenting adalah program IPHI manfaat bagi banyak orang, sehingga *migunani tumraping liyan*. Program yang sudah ditetapkan diharapkan *netes* atau membuahkan hasil," ujarnya sambil menambahkan untuk dana ada sumber yang berasal dari usaha, juga bisa dari kontribusi seluruh anggota meski jumlahnya sedikit tetapi banyak orang yang bisa berpartisipasi dalam pendanaan.

Muhamad SH MHum Kabag Hukum Setda Kulonprogo mewakili bupati dan wabup menuturkan, rakerda sebagai kegiatan dalam pemantapan perencanaan program dan kegiatan. **(Wid)-d**

KLAIM BPJS KASUS COVID-19 Hingga Maret Sudah Capai Rp 28 M

SLEMAN (KR) - Hingga bulan Maret 2021 ini, sudah ada 472 klaim kasus penanganan Covid-19 dengan besaran biaya mencapai Rp 28 miliar yang masuk ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Yogyakarta. Klaim tersebut meliputi wilayah Kota Yogyakarta, Bantul dan Gunungkidul.

Jumlah tersebut menurut Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Fatma Kurniawati kepada wartawan dalam acara Temu Media dan Informasi Program JKN-KIS di Depok, Sleman, Senin (22/3) diperkirakan akan terus bertambah. Itu berkaca dari jumlah klaim di tahun 2020 yang jumlahnya jauh lebih besar dari klaim awal tahun ini.

Di tahun 2020 lalu, BPJS Cabang Yogyakarta mencatat ada sebanyak 4.722 klaim kasus penanganan Covid-19 yang masuk dengan total besaran biaya mencapai Rp 279 miliar. "Klaim ini masih akan diverifikasi data-datanya. Setelah proses verifikasi, nantinya untuk roses pembayaran, nanti akan langsung dari BPJS ke rumah sakit, jelasnya saat mendampingi Kepala

BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Prabowo.

Selain penyelesaian klaim penanganan biaya pasien Covid-19, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Prabowo merencanakan perkembangan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dijelaskannya, hingga 4 Maret tahun ini, jumlah peserta melalui BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta mencapai 92,04 persen. Cakupan tersebut dijelaskan Prabowo meliputi tiga wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, yakni Kota Yogyakarta 95,43 persen, Kabupaten Bantul 87,74 persen dan Kabupaten Gunungkidul 95,54 persen.

Lebih lanjut Prabowo menjelaskan, berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri, total penduduk di tiga kabupaten/kota tersebut adalah 2.145.432 jiwa dan yang sudah terdaftar dalam Program JKN KIS sebanyak 1.954.759 jiwa. Dari jumlah itu, kepesertaan paling banyak berasal segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik itu PBI APBN maupun APBD. **(Hit)-d**

HUKUM

Bus Ngeblong, Seorang Janda Tewas

KARANGANYAR (KR) - Bus pariwisata PO Haryanto Nopol B 3744 VGA menabrak pengendara sepeda motor sampai meninggal dunia. Pengemudi bus Yuda Ardianto asal Jalan Muding Indah Korobekan Kuta Utara Denpasar Bali, menerobos *traffic light* di simpang empat Kebakkramat di ruas Jalan Solo-Sragen, tepatnya di Dukuh Wirorejan Kemiri Kebakkramat, Minggu (21/3).

Kasat Lantas Polres Karanganyar, AKP Suwarko, Senin (22/3), mengatakan korban tewas bernama Sutarti (49). Pengendara sepeda motor Honda Supra 125 nopol AD 6032 AGE tersebut beralamat di Taraman Sidoarjo Kabupaten Sragen. Ia adalah seorang janda beranak empat. Kesehariannya bekerja sebagai buruh tani.

"Dari arah Tasikmadu, pengendara sepeda motor berhenti di lampu merah simpang empat Kemiri. Saat lampu menyala hijau, korban pun melaju ke barat. Tapi dari arah Sragen atau utara melaju kencang bus. Bahkan ngeblong lampu merah," ungkapnya.

Bus itu menabrak sepeda motor tepat di tengah jalan. Sepeda kotor dan pengendaranya tergilas di kolong bus. Waktu kejadian korban masih sadar kemudian dirawat di RS. Moewardi Solo. Tak lama kemudian korban meninggal dunia. Polisi mengamankan sopir sebelum di-amuk massa ke Polres Karanganyar. Sedangkan busnya juga digiring ke kantor polisi. Terdapat retakan di kaca sopir. Sepeda motor korban juga diangkut polisi. **(Lim)-d**

KORBAN TENGGELAM BELUM DITEMUKAN 4 SRU Lanjutkan Pencarian Hari Kedua

WATES (KR) - Upaya pencarian korban, Jabar Nurkholis Setiawan (9) yang hilang tenggelam di muara Sungai Serang dilanjutkan kembali, Senin (22/3) pagi. Sampai berita ini diturunkan korban masih dalam pencarian. Humas Basarnas Yogyakarta, Pipit Eriyanto mengatakan, pencarian korban kembali dilanjutkan tim relawan gabungan mulai pukul 07.00. Pencarian

masih difokuskan di sekitar lokasi kejadian dan pantai di kedua sisi muara Sungai Serang.

Upaya pencarian korban dilakukan petugas gabungan dari Basarnas Yogyakarta, Satlinmas Rescue Istimewa (SRI) wilayah V Kulonprogo, TNI/Polri, dan sejumlah relawan dari MDMC, Baguna, Tagana, PMI dan masih banyak lagi. "Pada hari pertama pen-

carian belum membuahkan hasil. Pencarian korban kami lanjutkan kembali hari ini dengan membagi menjadi empat Search and Rescue Unit (SRU). Semoga korban bisa ditemukan," jelasnya.

Memasuki hari kedua pencarian, tim terbagi menjadi empat Search and Rescue Unit (SRU). SRU I akan melakukan penyelamatan di sekitar lokasi kejadian tenggelam dengan radius 100 meter. Sedangkan SRU II melakukan penyisiran menggunakan perahu karet dengan radius 1 kilometer. SRU III melakukan penyisiran darat dari muara Sungai Serang atau pemecah ombak hingga ke Pantai Glagah di sisi barat. SRU IV melakukan penyisiran dari muara Sungai Serang ke sisi timur.

Korban Jabar Nurkholis Setiawan sebelumnya berkunjung ke Pantai Glagah bersama kerabatnya yang ada di Krembangan Pantjatan. **(M-4)-d**



Tim relawan gabungan melakukan pencarian hari kedua di Muara Sungai Serang.

KREDIT MACET BANK JOGJA RP 27,4 MILIAR

OJK Lakukan Audit, Kejati Kumpulkan Alat Bukti

YOGYA (KR) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY telah menerjunkan tim pengawas untuk melakukan audit dan pembinaan terkait kasus fraud atau kejahatan perkreditan Bank Jogja. OJK juga telah meminta bank yang bersangkutan untuk membentuk cadangan atas kerugian yang dialami akibat dugaan kasus korupsi kredit macet.

"Rekan-rekan pengawas OJK sudah melakukan audit dan pembinaan serta telah dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan. Terkait kerugian kami sudah minta Bank Jogja membentuk cadangan yang sudah ditangani penegak hukum sekarang," ujar Kepala OJK DIY, Parjiman, Senin (22/3).

Parjiman menuturkan berkaca pada dugaan kasus tersebut, pihaknya selalu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap industri jasa keuangan yang dilakukan setiap harinya. OJK meminta perbankan meningkatkan mitigasi risiko termasuk dalam pemberian kredit yang prudent dan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan aspek governance.

"Kita evaluasi pengaruh dari adanya kasus tersebut terhadap kinerja Bank Jogja nantinya. Hal ini terkait pencabutan izin usaha apabila terbukti melakukan fraud, kita ada kriterianya untuk pencabutan izin usaha," tandasnya.

Pihak Kejati DIY sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi penyimpangan pemberian kredit di Bank

Jogja pada Tahun 2019 dengan kerugian ditaksir sekitar Rp 27,4 miliar. Saat ini penyidik sudah memeriksa 40 saksi dari pihak bank, kreditur dan saksi ahli.

Aspidsus Kejati DIY Eri Pudyanto Marwantono SH MH didampingi Kasi Penyidikan Gunawan Wisnu SH MH dan Plh Kasi Penkum Mohammad Fatin SH, Senin (22/3), mengungkapkan petugas melakukan penyelidikan sejak awal Januari 2021. Dalam proses penyelidikan, jaksa penyidik telah memanggil 20 orang untuk dimintai keterangan.

"Dari hasil keterangan itu, penyidik menemukan adanya dugaan pidana korupsi. Akhir Januari 2021 lalu, jaksa penyidik meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan," ungkapnya.

Kasus ini bermula pada Agustus Tahun 2019, Bank Jogja melakukan MoU dengan sebuah perusahaan swasta di Yogya untuk pemberian kredit karyawan. Kemudian pada September hingga Desember 2019, perusahaan tersebut mengajukan pinjaman untuk 167 karyawan.

"Atas pengajuan kredit tersebut, pihak bank mencairkan kredit sebesar Rp 27,4 miliar secara bertahap. Untuk pinjamannya berkisar Rp 80 juta hingga Rp 300 juta dengan masa waktu 10 tahun atau 120 bulan," terangnya.

Ternyata dari 167 karyawan tersebut, hanya 5 orang yang merupakan karyawan tetap perusahaan. Sedangkan sisanya merupakan karyawan fiktif. Kemudian mulai September 2020, kredit macet. Dalam proses penyidikan ini, tim jaksa penyidik sedang melakukan pengumpulan alat bukti untuk menentukan tersangka.

Di samping itu juga melakukan penghitungan kerugian negara akibat penyimpangan pemberian kredit di Bank Jogja. "Kalau alat bukti sudah terpenuhi, kami akan segera menetapkan tersangka. Sedangkan untuk kerugian negara secara pasti, masih dilakukan penghitungan," tuturnya.

Terkait masalah tersebut, Dirut Bank Jogja Kosem Junaedi, mengaku menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. "Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selanjutnya kami menyerahkan kepada Kejaksaan Tinggi DIY seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Bank Jogja selalu bersikap kooperatif dalam rangka penyelesaian kasus hukum tersebut," ungkapnya. **(Sni/Ira)-d**

PERKARA PENGALIHAN ASET PEMKAB BANYUMAS

Bareskrim: Ada Perbuatan Melawan Hukum

BANYUMAS (KR) - Perkara aset tanah dan bangunan milik Pemkab Banyumas seluas 6.571 m2 dan 51 Ruko di Kebondalem Purwokerto Purwokerto," jelas Ananto Widagdo selaku pengadu yang mewakili masyarakat Banyumas, Minggu (21/3). Rapat yang dipimpin oleh Asisten Deputi Kamtibmas Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Drs Ervin Chahara Rusmana, menindaklanjuti adanya surat aduan masyarakat ke Presiden Joko Widodo tentang percepatan perkara aset Kebondalem 10 Maret 2021. "Dalam penjelasannya, Kasubid IV Kombes Indarto dari Tipikor Bareskrim Mabes Polri dalam penge-

membahas permasalahan pengadilan masyarakat terhadap konflik berlatar belakang lahan Kebondalem Purwokerto," jelas Ananto Widagdo selaku pengadu yang mewakili masyarakat Banyumas, Minggu (21/3).

Rapat yang dipimpin oleh Asisten Deputi Kamtibmas Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Drs Ervin Chahara Rusmana, menindaklanjuti adanya surat aduan masyarakat ke Presiden Joko Widodo tentang percepatan perkara aset Kebondalem 10 Maret 2021. "Dalam penjelasannya, Kasubid IV Kombes Indarto dari Tipikor Bareskrim Mabes Polri dalam penge-

lolaan aset Kebondalem ada perbuatan melawan hukum," jelasnya.

Perbuatan melawan hukum yakni adanya kesepakatan Pemkab Banyumas dengan PT GCG pada tahun 2016 yang isinya berbeda dengan putusan pengadilan. Sehingga menyebabkan adanya kerugian negara yakni aset Pemkab tidak dimiliki oleh Pemkab Banyumas.

Ananto menambahkan mengutip penjelasan Kombes Indarto dalam penyelidikan perkara tersebut ada kendala dengan belum didapatkannya dokumen perjanjian Pemkab Banyumas dengan PT GCG yang asli dari Pemkab Banyumas. **(Dri)-d**